

**MENINJAU MASALAH PANGAN INDONESIA DAN RELEVANSINYA  
DENGAN PERSPEKTIF POSITIVISME AGUSTE COMTE**

**Wilibrodus Putra Mones<sup>1</sup>, Placidus Willemos Soiandro Kalfinus<sup>2</sup>, Yoseph Freinademetz Hali  
Keban<sup>3</sup>, Wilhelmus Benggu<sup>4</sup>**

[monesromy@gmail.com](mailto:monesromy@gmail.com)<sup>1</sup>, [dhokalfinus@gmail.com](mailto:dhokalfinus@gmail.com)<sup>2</sup>, [bertokeban0@gmail.com](mailto:bertokeban0@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[itobenggu991@gmail.com](mailto:itobenggu991@gmail.com)<sup>4</sup>

**Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero**

**Abstrak**

Situasi terkini yang tengah terjadi dan mencekik negara kita Indonesia adalah masalah pangan. Hal ini ditinjau dari meroketnya harga beras dan kerusakan alam sebagai efek industrialisasi. Jika dilihat lebih jauh masalah ini, adalah suatu ironi bagi bangsa Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya. Fakta menunjukkan apabila kekayaan alam kita hanyalah suatu pengakuan atau pernyataan. Akan tetapi, masyarakat masih belum dikatakan cukup bagi kebutuhan domestiknya. Ini adalah problem serius yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Konsekuensi dari masalah pangan menimbulkan dampak buruk bagi pertumbuhan pembangunan dalam berbagai segi kemasyarakatan. Melalui kerangka teori positivisme Aguste Comte secara khusus tentang teori hukum tiga tahap, kelompok akan mengupas realitas yang terjadi di Indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhadap pangan di Indonesia. Comte menekankan fakta-fakta yang tampak sebagai kebenaran. Menurutnya pengetahuan empiris adalah jalan menuju kebenaran yang sesungguhnya. Konsep positivisme memiliki keterkaitan dengan permasalahan pangan di Indonesia karena realitas masalah pangan tampak secara nyata dan dapat dianalisis kebenarannya dari semua fakta yang tersedia. Sumber utama penulisan adalah berita aktual seputar permasalahan pangan dan studi kepustakaan yang terkait secara formal dan material. Fakta-fakta menunjukkan kuantitas petani gurem yang semakin kecil, kerusakan pangan akibat bencana alam maupun wabah dan kekayaan alam yang hanya dikuasai oleh oknum tertentu. fakta-fakta ini ditemukan melalui studi kepustakaan dan realitas yang terjadi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Permasalahan Pangan, Indonesia, Aguste Comte, Konsep Positivisme.

**Abstract**

*The current situation that is currently occurring and strangling our country, Indonesia, is the food problem. This is seen from the skyrocketing price of rice and damage to nature as an effect of industrialization. If we look further at this problem, it is an irony for the Indonesian nation which is rich in natural resources. Facts show that our natural wealth is just a confession or statement. However, society is still not said to have enough for its domestic needs. This is a serious problem that both the government and society itself must pay attention to. The consequences of food problems have a negative impact on development growth in various aspects of society. Through the framework of Aguste Comte's positivism theory, specifically the three-stage legal theory, the group will examine the reality of what is happening in Indonesia and how it affects food in Indonesia. Comte emphasized facts that appeared to be true. According to him, empirical knowledge is the path to real truth. The concept of positivism is related to food problems in Indonesia because the reality of food problems is clearly visible and can be analyzed for its truth from all available facts. The main sources for writing are actual news about food issues and literature studies that are related formally and materially. The facts show that the quantity of smallholder farmers is getting smaller, food is damaged due to natural disasters or epidemics and natural wealth is only controlled by certain individuals. These facts were discovered through literature study and the reality that occurred in Indonesia.*

**Keyword:** Food Problems, Indonesia, Aguste Comte, Concept of Positivism.

**PENDAHULUAN**

“Dunia merupakan sebuah kampung global (global village),” demikian Marshall McLuhan, seorang sosiolog asal Amerika Serikat, menggambarkan perkembangan dunia saat

ini. Pelbagai aspek kehidupan manusia (sandang, pangan dan papan) di dunia modern beriringan dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang meningkat. Aspek-aspek kebutuhan manusia itu adalah suatu ranah yang perlu diperoleh bagi semua masyarakat Indonesia yang berbasiskan pada sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Konsep keadilan sosial ini juga dikaitkan dengan peraturan mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang terdapat dalam Bab XIV- Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Letak negaranya yang berada pada daerah katulistiwa dan ring of fire (cincin api) menjadikan bangsa Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat menunjang kebutuhan masyarakatnya. Dari sumber daya alam yang melimpah, bangsa Indonesia memiliki berbagai jenis pangan atau bahan makanan yang dapat diolah dan guna dikonsumsi. Bahan-bahan pangan seperti: padi, umbi-umbian, sorgum, kacang-kacangan dan berbagai jenis buah-buahan. Beragam hasil alam ini dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir bangsa ini mengalami masalah pangan. Ini adalah masalah serius yang mestinya tidak luput dari pandangan pemerintah, mengapa? Secara logis, tanpa pangan atau makanan seorang manusia tidak mampu melakukan aktivitasnya. Tubuhnya akan lemas dan mati kelapran.

Dalam makalah ini, kelompok meninjau masalah pangan yang terjadi akhir-akhir ini dengan menggunakan hukum tiga tahap dalam positivisme Aguste Comte. Kelompok menilai bahwasanya masalah pangan (food problem) merupakan kasus yang berpotensi mereduksi kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sebagai kemungkinan yang harus diantisipasi. Agar pangan di negara ini tidak menurun akan tetapi tetap pada taraf normal. Sehingga daripada itu, masyarakat Indonesia memperoleh kepenuhan kebutuhan akan pangannya. Sebab masalah pangan merupakan masalah krusial dan merupakan salah satu aspek yang harus dipenuhi bagi setiap individu sebagai makhluk ekonomi (homo economicus).

## **LANDASAN TEORI**

SW Nugroho melihat konsep positivisme Aguste Comte mengaitkannya dengan tradisi Julen Cembengan yakni sebuah tradisi yang dirayakan menjelang dimulainya proses penggilingan tebu. Maksud dari perayaan tradisi ini agar karyawan-karyawan atau semua pekerja yang terlibat dalam proses penggilingan tetap sehat dan aman. Tradisi ini dibuat untuk mendoakan para pekerja agar selamat. Nugroho melihat kaitan konsep positivisme tidak saja pada nilai-nilai luhur yang ada dalam sejarah tetapi juga melihat nilai-nilai sosial di balik sarana-sarana yang digunakan seperti; kepala kerbau, nilai etos kerja, tebu temanten, lambang gula dan kembar mayang sebagai lambang keluhuran dan kebesaran ritual tersebut. Bahwasanya tradisi yang dibuat ini menyadarkan masyarakat bahwa berbagai bentuk tradisi yang dianut tidak saja memiliki mistis dan formalitas semata tetapi memiliki makna filosofis yang dapat diterapkan di dunia dan makna filosofis itu sebenarnya ada dan tampak di sekitar masyarakat. Kebanyakan peneliti belum menggunakan konsep positivisme sebagai acuan untuk meneliti tentang pangan meskipun hal ini ditinjau mealalui segi ekonomi, politik dan atau sosial. Konsep Positivisme terobsesi kepada fakta-fakta empiris, yang dapat ditangkap panca indera dan menjadikan segala realitas kehidupan sebagai objek kajiannya. Noni Setyorini, Efriyani Sumastuti dan Hesty Utami, Ratih melihat ketahanan pangan rumah tangga dalam menghadapi pandemi Covid-19. Peneliti melihat bahwa ketahanan pangan dalam setiap keluarga belum maksimal sebab tingkat ketahanan pangan masih tergantung pada tingkat pendidikan terutama pengeluaran dalam hal bahan makanan yang bergizi dan bermutu bagi tubuh. Pengeluaran dalam biaya pangan masih belum optimal dan cenderung mengganggu kestabilan ketahanan pangan nasional. Solusi yang dibuat adalah pengaturan pengeluaran biaya bahan pangan dalam keluarga secara optimal terutama berkaitan dengan gizi dan pangan yang bermutu bagi kesehatan tubuh. Peneliti melihat ketimpangan pangan pada tingkat pendidikan dan pengoptimalan biaya bahan pangan. Di sisi

lain, Febrian Basundro, Alfian dan Haidar Sulaeman, Fadhil melihat ketahanan pangan nasional yang digagas oleh pemerintah yakni Food Estate sebagai suatu cara memperkuat pangan pada era pandemi covid-19. Peneliti melihat bahwa pengembangan Food Estate oleh pemerintah akan berdampak positif dalam memperkuat kebutuhan pangan. Selain itu juga, dengan adanya Food Estate timbul dampak lain seperti semakin terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan terciptanya keadilan sosial bagi semua masyarakat. Pengembangan Food Estate sebagai sumber ketahanan pangan memberi dampak yang signifikan bagi ketahanan pangan nasional. Shulton Asnawi, Habib mengkaji konsep positivisme dalam ranah hukum dalam pemberantasan korupsi untuk menegakan HAM (Hak Asasi Manusia). Hukum positif mengatur kehidupan masyarakat secara konkret yang bersifat empiris. Artinya hukum tidak berkaitan dengan agama, moral maupun hal sopan-santun. Hukum positif berkaitan dengan kehidupan sosial empiris yang diatur secara tertulis dan bebas dari pandangan yang ideologis yang jauh dari kenyataan sehingga hukum yang dibentuk adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Sedangkan tindakan korupsi selalu berkaitan dengan hajat hidup banyak orang karena mengambil uang negara memiliki makna yang sama dengan mencuri uang rakyat. Peneliti melihat bahwa dengan konsep positivisme yang mengatur semua aturan dalam masyarakat secara lebih bersih dan rapi dan jauh dari pandangan ideologis yang jauh dari realitas akan membawa kesamaan hak dan tidak adanya pelanggaran atas hak-hak hidup semua masyarakat sehingga kehidupan bernegara dapat berjalan dengan baik. Konsep positivisme Aguste Comte dapat digunakan untuk melihat fakta-fakta sosial yang terjadi dan mencari solusinya secara lebih kondusif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fakta Sejarah**

Dalam sejarah panjang ketahanan pangan, krisis pangan terjadi karena kesalahan kebijakan dan perubahan kebijakan mengikuti penguasa. Mears dan Moeljono menuliskan bahwasanya Pemerintah Kolonial Belanda selalu menginginkan harga buruh yang murah bagi investasi pertaniannya di Nusantara. Maka pemerintah menetapkan harga dasar pangan dan beras selalu ditekan rendah, karena harga beras sangat penting bagi konsumsi keluarga, sehingga perlu membuat harga dasar pangan utama tersebut rendah sepanjang waktu. Pemerintah Kolonial sangat memperhatikan kebutuhan dasar yakni pangan diatur semurah mungkin agar mereka dapat membelinya dengan murah dan tidak rugi, hal ini mereka lakukan sebagai antisipasi terhadap pasokan makanan bagi para tentara. Selain itu banyak masyarakat juga memiliki akses yang baik terhadap makanan. Hal yang sama dilakukan oleh Soekarno. Ia menggunakan pola yang sama namun hasil penjualan beras digunakan untuk membayar gaji bulanan pegawai negeri sipil dan militer agar dua komponen ini tetap mendukung rezim yang dipimpin olehnya. Hal yang sama juga dilakukan pada masa pemerintahan Soeharto. Selama 32 tahun PNS dan militer mendapatkan gaji bulanan yang sangat besar dari penjualan pangan. Bahkan pada masa ini beras dijadikan sebagai tolak ukur kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki beras tergolong dalam kelas yang belum mampu. Tahun 1967 dibentuklah Badan Urusan Logistik (BULog) yang diproyeksikan untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia melalui dua mekanisme: stabilisasi harga beras dan pengadaan bulanan untuk PNS dan militer. BULog berfungsi sebagai pengontrol harga beras dengan cara mematok harga beras domestik secara signifikan lebih tinggi dari harga beras dunia. Akan tetapi, badan ini tidak bekerja secara efektif, dimana terjadi korupsi dalam tubuh BULog dan diduga penggunaannya untuk membayar gaji PNS dan Militer sebagai fondasi kekuasaan. Ironisnya, badan ini tetap dipertahankan. Dan pada akhir 1980 BULog tetap ditugasi untuk memerankan kontrol pasar perberasan Indonesia tetapi sedikit diperluas untuk menangani komoditas pangan lain seperti gula pasir, gandum, jagung, kedelai dan lain sebagainya.

Pada rezim Susilo Bambang Yudoyono (SBY) mempromosikan “revitalisasi pertanian”,

dengan upaya mencapai swasembada beras maupun non-beras. Swasembada beras yang dimaksudkan adalah setiap masyarakat harus bisa mengupayakan kebutuhan dasarnya tersendiri. Selain beras juga berlaku pengarus-utamaan pangan alternatif seperti jagung dan singkong. Sehingga, terjadi peningkatan kualitas kebijakan dibandingkan rezim kepresidenan sebelumnya. Revitalisasi pertanian ini termasuk di dalamnya juga ada pembangunan sektor agribisnis demi terciptanya nilai tambah komoditas agribisnis (agribisnis; adanya kepemilikan tanah oleh setiap masyarakat) demi pendapatan dan akses atas pangan yang lebih baik. Perjalanan kebijakan penguasa yang berbeda menyebabkan perbedaan ketahanan pangan di dalam negeri. Selain itu pasca reformasi, krisis pangan terjadi karena situasi dan kondisi alam dan perubahan iklim selain itu juga covid-19 menjadi pemicu krisis pangan karena pembatasan aktivitas masyarakat dan juga tingginya jumlah impor beras 500.000 juta ton dari tahun-tahun sebelumnya sedangkan di tahun ini jumlah impor beras jauh melebihi masa covid-19.

### **Situasi Terkini**

BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat sejak 10 tahun terakhir luas lahan pertanian mengalami penyempitan di beberapa daerah sedangkan jumlah petani gurem meningkat, presentase terbanyak petani gurem ada Papua Pegunungan dengan porsi 98,63%. Lalu, di Yogyakarta mencapai 87,75%, Bali 69,32%, Aceh sebanyak 57,68%, Kalimantan Selatan sebanyak 42,41%, dan Sulawesi Selatan 41,23%. Atqo mengatakan, di daerah-daerah itu luas lahan pertanian sudah semakin sempit. Tertanggal 14 Desember 2023, Sensus Pertanian mencatat Jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) sebanyak 29.342.202 unit atau turun 7,45 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 31.705.295 unit dan masyarakat Indonesia banyak yang beralih ke usaha yang melibatkan banyak pihak atau kerjasama oleh beberapa pihak, Jumlah Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) sebanyak 5.705 unit, naik 35,54 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 4.209 unit. Artinya luas lahan pertanian yang sempit ini dikerjakan oleh beberapa kelompok petani sedangkan hanya pada daerah-daerah tertentu yang luas lahan dan jumlah petani berimbang seperti, Kalimantan, Aceh, Riau dan lainnya. Sejak awal februari 2024, banyak media dan lembaga kemasyarakatan memberitakan keresahan masyarakat akibat melonjak harga beras di awal tahun. Tidak saja media yang mengkritik pemerintah tetapi masyarakat pun mulai turun ke jalan meminta penurunan harga dan solusi pemecahan masalah ini kepada pemerintah. Faktor lainnya yang perlu dikritisi seperti pengambilalihan hutan adat oleh pemerintah dan pembangunan industri yang merusak alam dan tanah dari masyarakat. Kegagalan Food Estate di Sumba Timur dan Kalimantan yang digagas sebagai sumber ketahanan pangan nasional bahkan merusak alam. Pembangunan industri di beberapa wilayah semakin memperkecil tanah garapan bahkan menyebabkan kerusakan alam, seperti, pembangunan geothermal di Manggarai Timur, pembangunan bendungan bener di Jawa Tengah, bahkan adanya pembangunan ini dapat mengganggu kehidupan satwa liar di hutan. Permasalahan lainnya, jumlah petani gurem yang bekerja perorangan mengalami penurunan di sisi lain meningkatnya jumlah petani yang berkelompok namun bekerja pada lahan yang sempit dan tidak adanya minat anak muda untuk bekerja sebagai petani. CNBC Indonesia (1 desember 2022), mengungkap penelitian mereka di kalangan anak muda bahwa penyebab menurunnya minat anak muda untuk menjadi petani adalah menjadi petani berarti tidak dapat mengembangkan karir (36,3%), memiliki resiko yang besar (33,3%), pendapatan kecil (20,0%), merasa tidak dihargai (14,8%) dan tidak menjanjikan masa depan yang baik (12,6%). Artinya bahwa menjadi seorang petani juga membutuhkan modal dan juga kreativitas yang besar oleh setiap pribadi. Bahwasanya untuk menjadi petani yang sukses tidak saja bekerja demi hasil panen yang melimpah tetapi juga perlu adanya modal untuk memulai bahkan membuka usaha baru tetapi juga kreativitas untuk membangun dan membuat sesuatu yang menarik minat . Berbagai solusi seperti impor beras untuk ketahanan pangan telah dibuat, bantuan kepada para petani dalam bentuk, benih maupun sarana kerja telah dibuat bahkan akhir-akhir ini munculnya petani millennial yang bekerja menggunakan alat digital dan mempromosikan berbagai hal baru

dalam bertani. Program ini termasuk berjalan baik dan menghasilkan banyak petani muda yang berkualitas akan tetapi permasalahan yang muncul adalah ketimpangan sumber daya manusia, dimana program ini dapat terealisasi dengan baik di masyarakat perkotaan dan hanya di beberapa provinsi sedangkan masyarakat pedesaan yang memiliki kualitas internet yang buruk tidak efektif. Pelbagai usaha telah dilakukan demi ketahanan pangan yang lebih kokoh dan terjamin namun antisipasi ini belum berjalan dengan baik.

### **Relevansi Hukum Tiga Tahap Aguste Comte Dengan Masalah Pangan Indonesia**

Aguste Comte (1798-1857) adalah seorang filsuf dari Prancis yang disebut sebagai peletak dasar ilmu Sosiologi dan juga yang memperkenalkan nama 'Sociology'. Aguste Comte yang lahir di Montpellier, Prancis pada 19 Januari 1798, adalah anak seorang bangsawan yang berasal dari keluarga katolik. Namun, dalam perjalanan hidupnya Comte tidak menunjukkan loyalitasnya terhadap kebangsawannya juga agamanya dan hal tersebut merupakan pengaruh susunan pergolakan sosial, intelektual dan politik pada masanya. Comte dikenal dengan teori positivismenya. Namun, perlu diketahui bahwa istilah positivisme pertamakali diperkenalkan oleh Saint Simon (sekitar 1829). Positivisme berakar pada empirisme, prinsip filosofis tentang positivisme dikembangkan pertama kali oleh empirisme Inggris Francis Bacon (sekitar 1600). Tesis positivisme adalah bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian menolak keberadaan segala kekuatan atau subyek di belakang fakta, menolak segala penggunaan metode diluar yang digunakan untuk menelaah fakta-fakta empiris.

Adapun teori tiga tahap dalam perkembangan sejarah pemikiran modern yang dikemukakan Comte dalam teori positivisme yaitu tahap teologis, tahap metafisis dan tahap positif.

#### 1) Tahap Teologis

Tahap teologis merupakan tahap pertama, yang paling awal dalam pemahaman manusia. Pada tahap ini, manusia memiliki kesadaran dalam dirinya mengenai suatu unsur tertinggi yang mempunyai kuasa dalam segala hal. Ia merupakan unsur absolut yang daripadanya segala makhluk berada atau yang menurut Aristoteles merupakan penyebab pertama yang menyebabkan yang lain (hukum causalitas). Hal ini dikarenakan oleh usaha manusia mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sukar dijangkau rasio nya.

Tahap teologis ini tidak muncul begitu saja melainkan didahului pula oleh suatu perkembangan secara bertahap yakni dari Fetiyisme, Poliyeisme dan yang terakhir Monoteisme. Bagi Fetiyisme maupun Poliyeisme akan berkembang dalam masyarakat yang masih terkungkung dan memiliki kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan gaib yang menguasai kehidupan manusia. Dengan kata lain, Fetiyisme dan Politeisme akan berkembang dalam masyarakat yang kehidupan dan pola pikirnya masih primitif. Sedangkan dalam bentuk Monotheism, kepercayaan mereka berubah bentuk menjadi dogma-dogma agama. Di Indonesia sendiri kepercayaan dalam bentuk Monoteisme sangat kuat meskipun dua model kepercayaan lain itu masih dapat dijumpai di berbagai daerah-daerah pedesaan. Kepercayaan Monoteisme atau agama mempunyai seruan-seruan mengenai masalah pangan. Sebagai contoh, dalam perspektif agama katolik, masalah pangan itu dilihat sebagai buah atau hasil dari keserakahan manusia mengeksploitasi alam. Pandangan ini seirama dengan pandangan dalam kitab Kejadian yang mana Allah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada manusia sebagai penguasa (bdk. Kej 1:26). Oleh karena itu, dalam Ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus berkata, "manusia seringkali jatuh dalam pandangan penguasa yang memiliki kuasa untuk mengambil dan menjarah semua yang ada di bumi tanpa memperdulikan penderitaan lingkungan di sekitarnya. Tindakan ini tidak hanya melukai lingkungan, tetapi juga kepada diri sendiri dan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Senada dengan ini, dalam perspektif Islam dalam memandang lingkungan. Lingkungan alamiah dideskripsikan sebagai kondisi alamiah. Lingkungan alamiah yang merupakan bagian dari bumi dipandang sebagai manifestasi dari kuasa Allah yang Maha

Menciptakan (Mawardi dan Sambodo, 2011). Transenden atas keagungan dan kebaikan Allah dengan demikian dapat dinikmati dalam representasi alam semesta. Tentunya penciptaan ini bukanlah sebuah coincidence atau ketidaksengajaan. Allah sebagai Great Designer telah merancang alam semesta sedemikian rupa sehingga tidak hanya ada begitu saja, tetapi memiliki makna dan tujuan yang benar.

## 2) Tahap Metafis

Tahap ini mempunyai kesamaan dengan tahap teologi di atas. Jika dalam tahap teologi, manusia berusaha mempertanyakan hal-hal yang rumit mengenai eksistensinya dan hal yang menyebabkan keberadaannya, maka pada tahap metafisika, manusia berusaha mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gejala-gejala alam. Pada tahap ini, dogma-dogma agama ditinggalkan dan kemampuan akal budi (ratio) dikembangkan. Walaupun pada tahap metafisik ini manusia masih menunjukkan hal-hal yang tidak berbeda pada masa teologis, namun di sini manusia sudah mampu melepaskan diri dari kekuatan yang adikodrati dan beralih pada kekuatan abstrak (Koento Wibisono Siwomiharjo 1996). Tahap ini ditandai dengan adanya satu kepercayaan bahwa manusia dan hukum-hukum alam secara abstrak yang diilustrasikan dengan bentuk pikiran yang bersifat filosofis, abstrak dan universal (Chabibi 2019). Tahapan ini merujuk pada kepercayaan-kepercayaan yang masih berlangsung di daerah-daerah yang masih berpegang teguh pada adat budaya tertentu misalnya hal ini dapat dijumpai di daerah Nusa Tenggara Timur seperti dalam budaya masyarakat Lio dengan mitos asal usul padi “Inde Pare” atau “Tonu wujo” (Lamaholot). Mengisahkan padi sebagai bahan pangan pokok di wilayah dimaksud berasal dari manusia sebagai makhluk hidup. Makanan itu hidup. Logisnya mendapat makanan merupakan hak asasi setiap manusia. Hidup dan pangan tidak bisa diceraikan. Mitos lainnya terdapat dalam budaya Cirebon, Jawa Barat “Dewi sri” yang diyakini dalam budaya setempat bahwa bahan pangan (padi) mempunyai hubungan erat yang tidak terpisahkan dengan manusia.

## 3) Tahap Positif

Tahap positif merupakan puncak dari pengetahuan manusia. Pada tahap ini manusia tidak mencari sebab-sebab peristiwa di luar yang diamati. Tidak lagi mencari ide-ide absolut, asli, penentu takdir semesta, dan penyebab fenomena. Tetapi menelusuri hukum-hukum alam yang menentukan fenomena dengan cara menemukan rangkaian hubungan dari alam itu sendiri (Ichwansyah Tamubolon 2016). Dengan kata lain manusia berusaha mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan fakta-fakta empiris. Manusia tidak lagi menyibukan dirinya dengan hal metafisik atau yang transenden. Maka dalam hal ini ilmu berguna bagi kehidupan manusia.

Ilmu mempermudah manusia dalam proses apapun itu. Ia sebagai instrumen yang melibatkan ratio. Di sini manusia mengenal kodratnya sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles sebagai (animal rationale) makhluk berpikir. Konsep ini dinyatakan dengan suatu alasan rasional bahwa manusia merupakan makhluk yang mampu membedakan dualisme antara baik buruk serta mampu bertindak dengan cara manusiawi sehingga ia dapat menekan dan menghilangkan rasa kebinatangannya. Ia sebagai makhluk yang mempunyai daya pikir yang tentunya tidak dijumpai pada makhluk lainnya yang mengandalkan insting dalam mempertahankan hidup.

Dengan kemampuan berpikirnya, manusia membuat hal-hal material yang mempermudah manusia dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau industrialisasi. Akan tetapi, dalam realitas yang ada saat ini manusia lebih cenderung menggunakan instrumen-instrumen untuk membunuh, memusnahkan ekosistem alam yang merujuk kepada kekurangan hingga kelangkaan pangan dan bukan status quo. Karena itu pemerintah Indonesia mengantisipasi hal ini melalui jalur hukum yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup. Dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan,

dan penegakan hukum. Akan tetapi, problem mengenai lingkungan yang merambah ke pangan masih menjadi masalah yang berumur panjang. Misalnya pada awal 2023 Indonesia dikejutkan dengan masalah pangan yang terjadi di Pulogadung, Jakarta Timur. Sebanyak 10 juta hingga 22 juta orang di Indonesia mengalami diare karena pangan dan air yang terkontaminasi dengan kerugian ekonomi Rp 70,5 triliun hingga Rp 250,5 triliun dalam setahun. Kerugian bisa jauh lebih besar karena efek jangka panjang pangan dan air yang terkontaminasi bisa menyebabkan lebih dari 200 penyakit, selain masalah gizi hingga tengkes (stunting) pada anak-anak. Penyakit yang ditularkan melalui pangan (foodborne illness/FBI), baik akibat mikroorganisme maupun kimia, telah menjadi beban utama kesehatan masyarakat, tetapi kerap terabaikan. Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2015, sekitar 600 juta orang, atau hampir 1 dari 10 orang di dunia, jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi dan 420.000 orang meninggal setiap tahun.

## **KESIMPULAN**

Dunia merupakan sebuah kampung global (global village). Dengan kemajuan peradaban manusia, ekosistem alam menjadi ancaman kepunahan maupun sebagai racun mematikan bagi manusia itu sendiri. Hal ini merupakan efek yang ditimbulkan oleh sikap ingin menguasai makhluk ciptaan yang lain. Meskipun manusia memiliki akal budi yang dapat dibedakan dari makhluk lainnya cenderung menggunakan akal budinya untuk memperdaya alam, mengeksploitasi alam.

Diskursus mengenai masalah lingkungan mempunyai kaitannya dengan masalah pangan. Masalah ini merupakan hal faktual di negeri ini. Karena masalah lingkungan sebagai representasi dari ibu yang terluka. Artinya negeri ini sedang mengalami sakit karena kekurangan pangan bagi anak-anak bangsa. Terlepas dari itu, dengan teori tiga tahap dalam positivisme Auguste Comte, kelompok berusaha menganalisis hingga pada taraf positifisme, manusia menjadi sentral dalam dunia (antroposentris). Ia menggunakan dan memperdayakan alam demi kepentingan dirinya sendiri. Maka dari itu setiap individu diharapkan mempertimbangkan kembali kemungkinan-kemungkinan kedepan yang akan terjadi pada alam sebelum bertindak. Ini tentunya mengindikasikan bahwa manusia sebagai salah satu dan bukan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan. Artinya bahwa perubahan itu tidak sekali jadi. Perubahan membutuhkan proses penuh kesadaran dari dalam individu. Kesadaran dalam hal ini berkaitan dengan cara berpikir yang baru. Karena itu, sastrawan Rusia, Leo Tolstói katakan: “kekuatan pikiran itu tidak kelihatan, bagaikan benih, yang darinya bertumbuh pohon yang raksasa. Ia merupakan sumber perubahan dalam kehidupan manusia.”

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. Luas Lahan Pertanian di Indonesia- 2023. By Badan Pusat Statistik. Oktober 2023. <<https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian di Indonesia. By Badan Pusat Statistik. Oktober 2023. <<https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. Luas Lahan Pertanian di Indonesia- 2023: By Badan Pusat Statistik. Oktober 2023. <<https://www.bps.go.id>
- Nugroho, Subyakto W. “Tradisi Julen Cembengan dalam Perspektif Positivisme Auguste Comte” (Surakarta: IAIN, 2020)
- Noni Setyorini, Efriyani Sumastuti, dan Hesty Utami, Ratih. “Urgensi Keamanan Pangan Rumah Tangga dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, Vol. 18, No. 1, Februari 2022
- Fevriani Basundro, Alfian dan Haidar Sulaeman, Fadhi, Meninjau Pengembangan Food Estate sebagai Strategi Ketahanan Pangan Nasional pada Era Pandemi Covid-19. Jurnal Lemhannas RI, Vol.8, No. 2, 17 Oktober 2022
- Shulton Asnawi, Habib. Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum. Jurnal Kajian Ilmu Hukum.

Vol. 2, No. 2, Desember 2013

- Mears, L. (1978), *Problems of Supply and Marketing of Food in Indonesia in Repelita III*, BIES Vol. XIV No. 3 pp 52-62
- Mutia Anur, Cindy. "Impor Beras 2024 Melebihi Tahunan Saat Pandemi". *Kata Data Media Kerja*. 16 Februari 2024. <<https://databoks.katadata.co.id>
- Putri, Aulia Mutiara. "Terungkap! Penyebab Anak Muda Ogah Jadi Petani". *CNBC Indonesia*. 1 Desember 2022. <<https://www.cnbcindonesia.com>
- Irham Nugroho, "Positivisme Aguate Comte: analisa epistemologis dan nilai etisnya terhadap sains", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 11, No. 2, Desember 2016.
- Muhammad Chabibi. "Hukum Tiga Tahap Aguste Comte dan Kontribusinya Terhadap Kajian Sosiologi Dakwah", *Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1, Juni 2019
- Dionisius Jeremias Setiadi dkk, "Pemeliharaan Lingkungan: Kajian Perbandingan Antara Ensiklik Laudato Si dan Teologi Lingkungan Muhammadiyah", *Jurnal integritas Terbuka: Peace and interfaith Studies*, Vol. 2, No. 2, November 2023.
- Fidelis Regi Waton, "Kritik Konsumsi Murni", *Jurnal Ledalero*, Vol. 16, No. 2, Desember 2017.
- Vanvaza Fauzan Azhima dkk. "Mitos dan Tepresentasi Dewi Sri Dalam Ritual Sinoman Upacara Adat Mapak Sri Di Desa Selangit, Kabupater Cirebon: Kajian Simeotika", *Jurnal Metahumaniora*, Vol. 10, No. 2, September 2020.
- Nita Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 3, No. 2, Maret 2017.
- Ahmad Arif dkk, "Pangan Tercemar Akibat Kerugian Ekonomi Rp 250,5 Triliun Setahun", *Kompas*, Februari 27, 2023.